

COALRUPTION

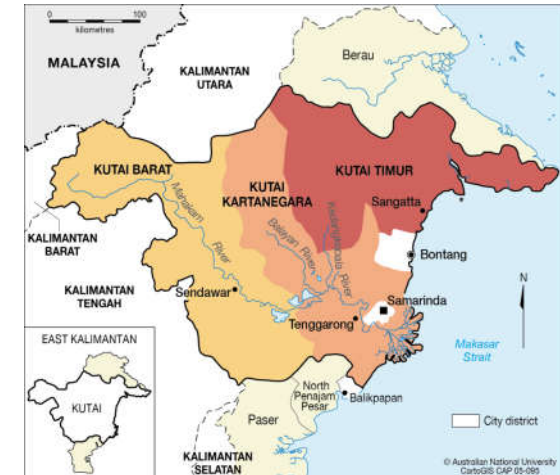
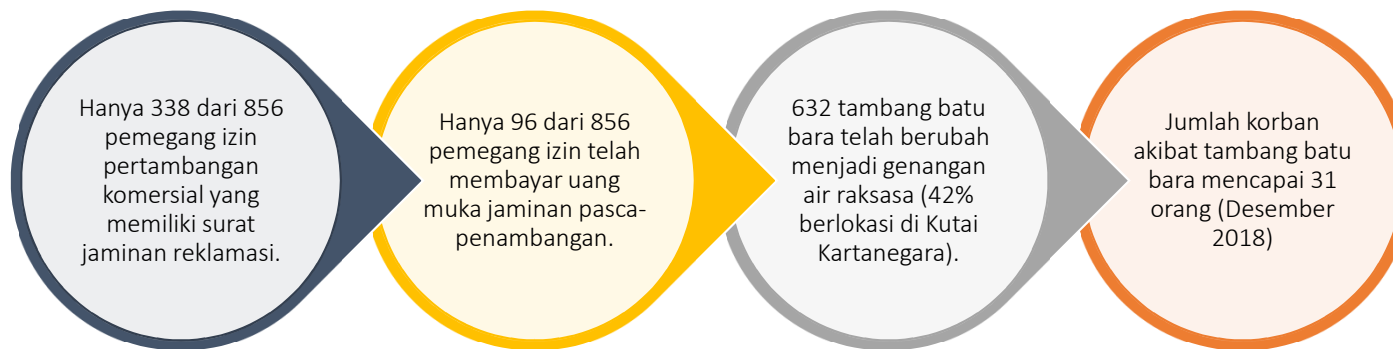
#ReformasiDikorupsi

Dipaparkan pada Diskusi Publik INDEF
EKONOMI POLITIK KORUPSI
Jakarta, 30 September 2019

GREENPEACE

Batu bara, ongkos demokrasi, dan korupsi politik

Tanggung jawab pengelola tambang batu bara yang terabaikan dan lolos dari hukum



Bagaimana korupsi terjadi dalam sektor ini?

Korupsi sebagai penyebab impunitas

- Proses penerbitan izin usaha pertambangan di tingkat lokal berisiko penyuapan dan *kickback*.
- Terjadi kenaikan ekspor batu bara ilegal menjadi 90 juta ton (Rp 58 triliun) tiap tahunnya.

Desentralisasi mendorong korupsi

- Peraturan desentralisasi memberikan kemampuan bagi pemerintah daerah untuk memberlakukan pajak baru dan menerbitkan izin pertambangan dan ekspor.
- Peningkatan jumlah izin pertambangan dan ekspor dari 750 hingga 10.000 (2001-2010), 40% di antaranya adalah untuk pertambangan batu bara.

Korupsi dan politik Indonesia

- Para kandidat atau parpol mengumpulkan dana kampanye dari perusahaan dengan imbalan penerbitan izin usaha penambangan.
- Mantan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, menerbitkan 254 izin usaha pertambangan batu bara.
- Gubernur Samarinda tahun 2000-2010, Achmad Amin, menerbitkan 63 izin tanpa melakukan Amdal yang sesuai dalam masa kampanyenya tahun 2009.

Bagaimana korupsi di industri pertambangan batu bara terjadi?

Rantai nilai industri ekstraktif/pertambangan.
Risiko korupsi dapat terjadi di berbagai titik dalam rantai ini.

KEPUTUSAN
UNTUK
MELAKUKAN
EKSTRAKSI

PEMBERIAN HAK
PERTAMBANGAN
DAN MIGAS

OPERASI
EKSTRAKSI DAN
REGULASI

PENGUMPULAN
PENDAPATAN

PENGELOLAAN
PENDAPATAN

PEMBELANJAAN
PENDAPATAN
DAN PROYEK
INVESTASI
SOSIAL

Sumber: Resource Governance Institute dalam OECD (2016)

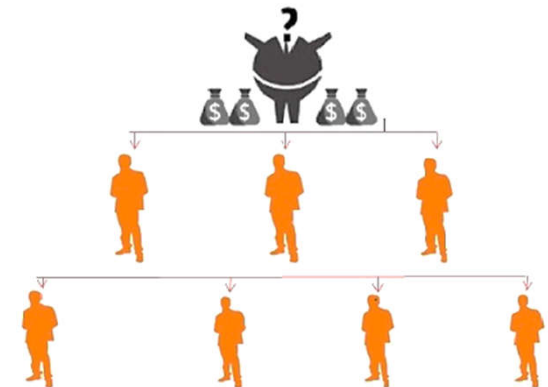
Di Indonesia, risiko korupsi terbesar terjadi pada saat **pemberian izin pertambangan dan penentuan lokasi tambang**. Beberapa bentuk praktik korupsi yang sering terjadi:

1. Pertukaran pengaruh (trading in influence)

2. Korupsi politik atau campur tangan politik (political capture or interference)

3. Korupsi peraturan (regulatory capture)

SIAPAKAH BENEFICIAL OWNER SEBENARNYA?



Pemilik badan usaha yang sebenarnya tidak diketahui.

Menyembunyikan *beneficial owner* yang memungkinkan pemilik usaha untuk bertindak monopoli atau kartel.

Tidak ada peraturan yang secara jelas mewajibkan perusahaan industri ekstraktif untuk mengungkapkan *beneficial owner*-nya.

Bisnis batu bara yang politis

Permainan para **POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEP)** dalam pertambangan batu bara



PEP adalah seseorang yang memegang atau pernah memegang peran publik, atau merupakan anggota keluarga, maupun kerabat dekat dari pejabat public tsb.



PEP dapat menyalahgunakan atau mengabaikan peraturan, regulasi dan kebijakan untuk memastikan bisnis batu bara dapat terus berlanjut dan menghasilkan keuntungan.



Terdapat **15 subsidi untuk industri batu bara Indonesia** dalam bentuk pemindahan tanggung jawab, pendapatan hilang pemerintah (*revenue foregone*), pengadaan barang dan jasa di bawah nilai pasar, dan dukungan pendapatan atau harga.



CHURCHILL VS NUSANTARA GROUP

Churchill bersengketa mengenai izin pertambangan dengan Nusantara Group milik Prabowo Subianto yang didukung oleh Isran Noor, gubernur Kaltim.

Mitra lokal Churchill, Ridiatama, mengeksploitasi hubungannya dengan pejabat daerah untuk memalsukan dokumen izin pertambangan.

Namun, Nusantara Group terbukti memiliki koneksi politik yang lebih kuat untuk memperpanjang izinnya dan mencabut izin Churchill.



PT BUMI Resources Tbk.



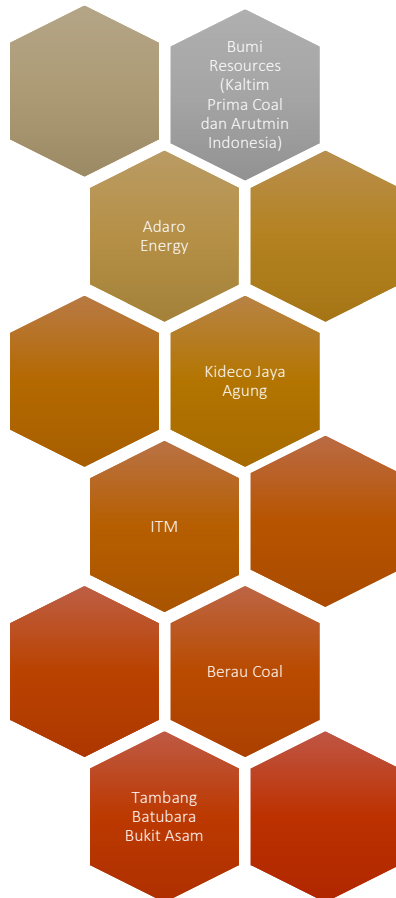
PT BUMI RESOURCES DAN ABURIZAL BAKRIE

BP dan Rio Tinto, pemilik PT Kaltim Prima Coal, mendapatkan perlindungan politik dengan berpihak pada Aburizal Bakrie. Bakrie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator dalam Kabinet Presiden SBY, lalu menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2009.

BP dan Rio Tinto menjual KPC kepada PT Bumi Resources milik Bakrie untuk melindungi mereka dari serangan Gubernur Kaltim serta aktor politik lainnya yang menggunakan isu nasionalisme dan lokalisme.

Beberapa tokoh PEP di balik batu bara

Enam perusahaan penghasil batu bara terbesar yang menghasilkan lebih dari 50 persen produksi batu bara di Indonesia (2015):



PEP yang terlibat dalam pengoperasian usaha pertambangan batu bara di Kaltim.



Sandiaga Salahudin Uno (Adaro Energy, pemegang saham)

- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta (2017-2018), Calon Wakil Presiden Pemilihan Presiden 2019, Mantan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.



Raden Pardede (Adaro Energy, Komisaris Independen)

- Wakil Koordinator Tim Asistensi Menteri Keuangan RI (2000 -2004); Ketua Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2004-2005); staff khusus Menteri Koordinator Perekonomian (2004-2005); Wakil Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset (2004-2008)



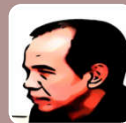
Theodore Permadi Rahmat (Adaro Energy, Wakil Presiden Komisaris)

- anggota Dewan Ekonomi Nasional (1999-2000)



Letnan Kolonel (Purn.) Palgunadi Tatit Setyawan (Adaro Energy, Komisaris Independen)

- Presiden Komisaris PT Jakarta Propertindo (2010-2013)



DR. H. Darmono, S.H., M.M (Berau Coal, Komisaris)

- Wakil Jaksa Agung RI (2009-2013); pelaksana tugas Jaksa Agung RI (2010)



Laksamana (Purn.) DR. Marsetio (Berau Coal, Komisaris Independen)

- Mantan Kepala Staf Angkatan Laut RI (2012-2014)

Kalimantan Timur: bukti korupsi batu bara yang nyata di Indonesia

Kaltim menduduki rangking ke-9 dari 10 provinsi dengan kasus korupsi terbanyak pada tahun 2015 (KPK).

- Selama pelaksanaan desentralisasi, kasus-kasus korupsi di Kaltim yang melibatkan anggota DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, semakin marak. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya batu bara.
- Motivasi utama dari tindakan korupsi adalah untuk **membayai kampanye pejabat**.

PEP daerah Kalimantan Timur - menyatukan bisnis dan politik



Syaukani Hasan Rais

- Ex. Ketua DPD Golkar Kaltim dan Ex. Bupati Kutai Kartanegara selama dua periode.
- Menggunakan jabatannya untuk menerbitkan izin pertambangan dalam jumlah drastis yang diduga digunakan untuk mendanai kampanyenya.
- Terbukti melakukan empat tindakan pidana korupsi yang merugikan negara Rp 120 miliar.



Rita Widayarsi

- Memperoleh warisan jaringan kolusi dari ayahnya, Syaukani, ketika ia menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010.
- Didukung oleh jaringan Tim 11 yang memfasilitasi proses penyuapan, gratifikasi, dan penggelapan uang.
- Membangun aliansi strategis dengan dua pejabat Golkar nasional dari kubu Aburizal Bakrie, yaitu Azis Syamsudin dan Idrus Marham, yang mendukung kampanye pilkada Rita yang kedua.



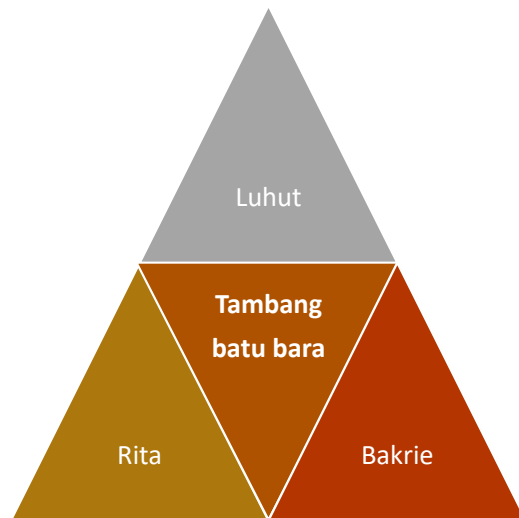
Khairudin (mantan anggota DPRD/organisasi pemuda Golkar) – ketua Tim 11



Azis Syamsudin merupakan komisaris perusahaan tambang milik ibu Rita, yaitu Sinar Kumala Naga.

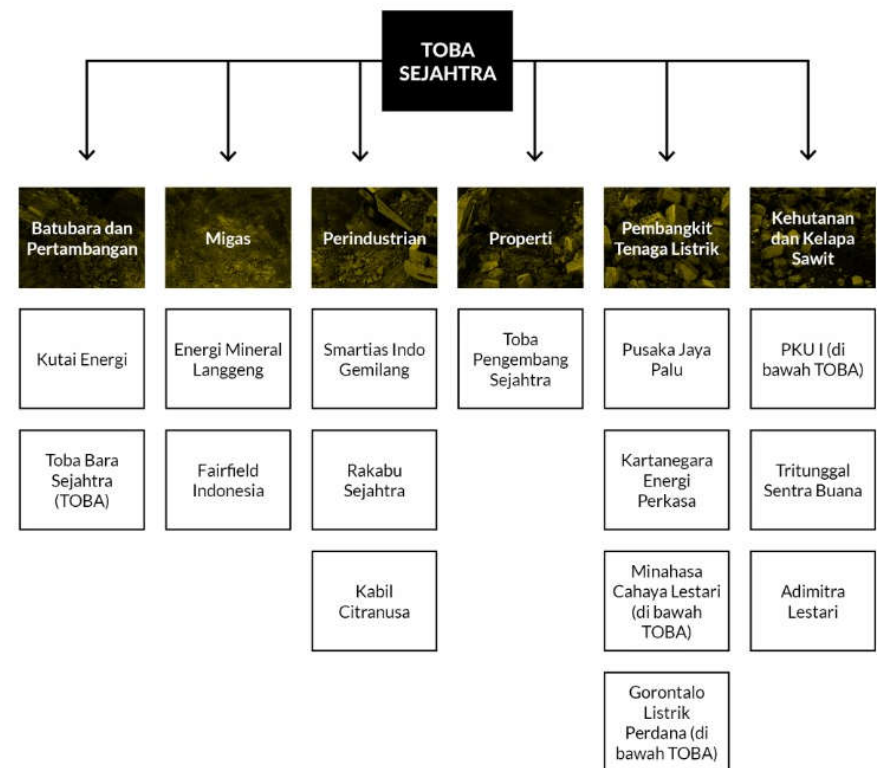
Contoh kasus: Toba Sejahtra – bisnis, politik dan konflik kepentingan

Contoh kasus korupsi politik di mana penyatuan politik dan bisnis di industri batu bara menciptakan beragam dampak negatif sosial dan lingkungan.



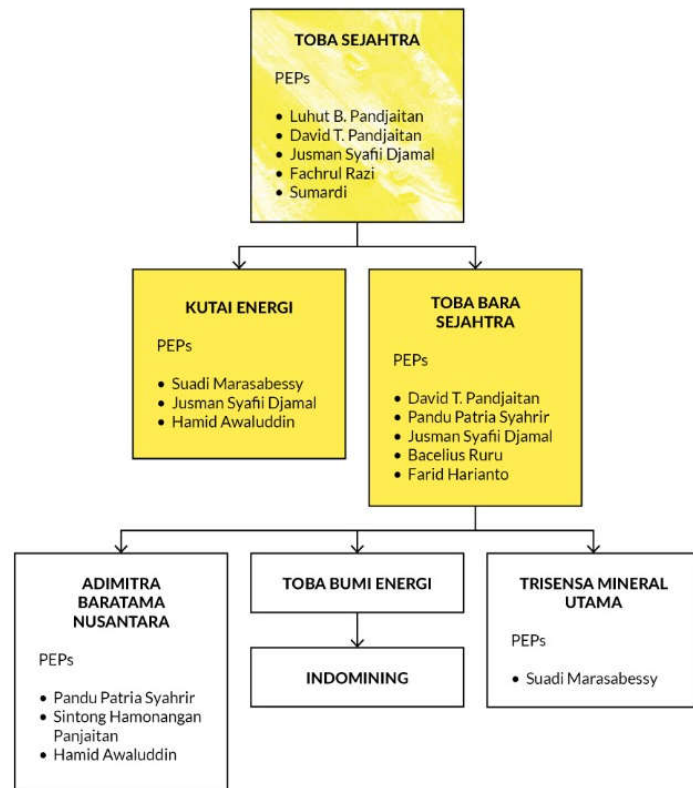
- Bakrie membantu Luhut merintis usaha pertambangan batu baranya pada tahun 2004 lewat jaringan yang dimiliki oleh Bupati Kutai Kartanegara saat itu, Syaukani Hasan Rais.
- Kemenangan Rita Widayari sebagai bupati Kutai Kartanegara pada 2010 memulihkan hubungan antara keluarganya dengan Luhut. Ia kemudian menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) bagi perusahaan-perusahaan milik Luhut.

Peta Grup Bisnis Toba Sejahtra milik Luhut



Contoh kasus: Toba Sejahtra – bisnis, politik dan konflik kepentingan

Terdapat beberapa PEP dari jaringan Luhut dalam militer dan birokrasi yang terlibat dalam bisnis pertambangan batu bara.



Peta PEP dalam usaha pertambangan batu bara Toba Sejahtra

Luhut memiliki pengaruh di tiga ranah: militer, Golkar, dan istana presiden.



Dukungan Luhut untuk Jokowi

Para jenderal di perusahaan Luhut merupakan rekan satu angkatan dengan Luhut di AKABRI 1970. Pada 2014, mereka membentuk kelompok jenderal purnawirawan dari ABRI dan polisi yang “mengapresiasi” pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden oleh Megawati Soekarnoputri dan PDI-P.

Konflik kepentingan penunjukan Luhut oleh Jokowi

Penunjukan Luhut sebagai pejabat sementara Menteri ESDM yang bertugas untuk mengatur kebijakan harga dan negosiasi harga antara industri PLTU dengan PLN, di saat Luhut masih memiliki saham di Kutai Energi melalui Toba Sejahtra.

Toba Sejahtra – mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan dan persoalan sengketa tanah

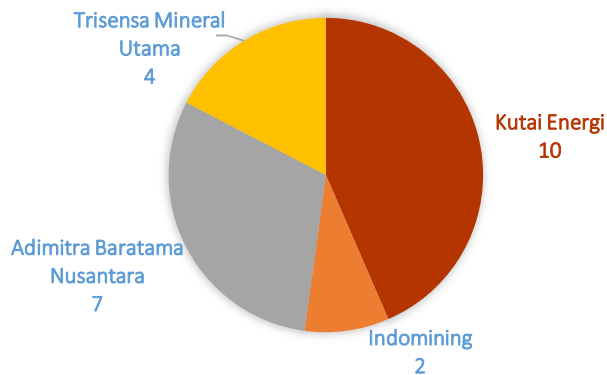


KASUS LUBANG TAMBANG

Toba Sejahtra menghindari hukum dengan mengabaikan lubang tambang terbuka serta mencemari air tanah.

Terdapat 23 lubang tambang yang ditelantarkan di Kutai Kartanegara.

LUBANG TAMBANG YANG DITELANTARKAN



KUTAI ENERGI

- 4 lubang terbuka di daerah konsensi Kutai Energi tidak direklamasi.
- Air dari salah satu lubang konsesi mengalir ke Sungai Nangka tanpa disaring.
- Pengujian kualitas air menunjukkan tingkat keasaman dan tingkat kontaminasi logam yang tinggi.

KASUS SENGKETA TANAH



Dalam penanganan kasus sengketa tanah yang dialami oleh grup Toba Sejahtra oleh pemerintah daerah Kaltim, terlihat bahwa pengaruh Luhut di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur sangat kuat.

Kutai Energi vs keluarga (alm.) Hamzah bin Cole

- Pengadilan tidak membatasi pergerakan perusahaan secara hukum atas status tanah tersebut walaupun Hamzah bin Cole telah memenangkan perkara atas kepemilikan lahan.

PKU I vs Kutai Energi, Trisensa Mineral Utama, dan Adimitra Baratama Nusantara

- Pengadilan memutuskan bahwa tuntutan yang diajukan oleh PKU I tidak sah karena terdapat negosiasi yang sedang berlanjut antara semua pihak. Lalu, tuntutan tsb dinilai telah melampaui jangka waktu untuk dibawa ke pengadilan.

Mengakhiri lingkaran setan politik mahal dan korupsi politik batu bara

Memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan batu bara. Kelemahan yang ada saat ini adalah kehadiran PEP dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batu bara.

Memperkuat langkah-langkah hukum, termasuk menyusun regulasi, untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEP, termasuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik yang ditimbulkan oleh “fenomena keluar masuk” di mana orang seringkali berpindah jabatan antara sektor publik dan swasta.

Menyoroti pemilik manfaat dalam usaha pertambangan batu bara. Jika pemilik perusahaan yang sebenarnya tersamar, publik tidak mungkin dapat mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan tersebut.

Menyusun peta jalan untuk menutup bisnis pertambangan batu bara di Indonesia. Dampak terhadap lingkungan dan komunitas, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan konflik sosial yang timbul akibat pertambangan batu bara sangat luas dan tidak dapat dihindari. Sebuah peta jalan harus dibuat untuk melakukan transisi energi dari batu bara ke energi bersih dan terbarukan.

Dalam konteks Pemilu dan Pilkada, menyusun regulasi pendanaan politik yang ltransparan dan murah, yang akan memutus lingkaran setan politik mahal dan korupsi politik batu bara

Terima kasih

GREENPEACE